

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0507/0/1989
tentang

Perubahan Nama Sekolah Di Propinsi Jawa Timur

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa sejalan dengan penambahan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dari hasil investasi masyarakat di Propinsi Jawa Timur sudah sampai tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat desa;
- b. bahwa berhubung pemekaran wilayah administrasi pemerintahan di Propinsi Jawa Timur mengakibatkan perubahan batas dan nama kecamatan di Propinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/0/1978;
 - b. tanggal 2 September 1978 No. 0292/0/1978;
 - c. tanggal 15 September 1978 No. 0299/0/1978;
 - d. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 dan No. 0371/0/1978;
 - e. tanggal 17 Februari 1979 No. 030/U/1979;
 - f. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - g. tanggal 3 September 1979 No. 0188/0/1979 dan No. 0190/0/1979;
 - h. tanggal 30 Juli 1980 No. 0206/0/1980 dan No. 0207/0/1980;
 - i. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980
 - j. tanggal 14 Juli 1981 No. 0219/0/1981;
 - k. tanggal 9 Oktober 1982 No. 0298/0/1982 dan No. 0299/0/1982;
 - l. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
 - m. tanggal 7 Nopember 1983 No. 0472/0/1983;
 - n. tanggal 9 Nopember 1983 No. 0473/0/1983;
 - o. tanggal 20 Nopember 1984 No. 0557/0/1984;

- : p. tanggal 9 Agustus 1985 No. 0353/0/1985;
- q. tanggal 22 Nopember 1985 No. 0594/0/1985 dan No. 0601/0/1985;
- r. tanggal 10 Oktober 1986 No. 0708/0/1986;
- s. tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/0/1986 dan No. 0887/0/1986.

perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 4 Juli 1989 Nomor B-645/I/Menpan/7/89.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 - Pertama : Mengubah nama sekolah di Propinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
 - dua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan ketentuan dik-tum "Pertama".
 - Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 - Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

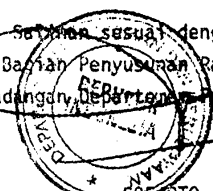
BAMBANG TRIANTORO

NAMA LAMA					NAMA BARU		
NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAMADYA/ KOTA ADMINISTRATIF	DASAR HUKUM KELEMBAGAAN (KEPMEND/KBUD)	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA ADMINISTRATIF
<u>XVII. KABUPATEN TRENGGALEK</u>							
	1. SMA Negeri Trenggalek	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	0371/0/1978	SMA Negeri 1 Trenggalek	Trenggalek	Kabupaten Tre
	2. SMA Negeri Durenan		ek	0298/0/1982	SMA Negeri 1 Durenan	Durenan	Kabupaten Tre
<u>XVIII. KABUPATEN LUMAJANG</u>							
	1. SMA Negeri Lumajang	Lumajang	Kabupaten Lumajang	0371/0/1978	SMA Negeri 1 Lumajang	Lumajang	Kabupaten Lum
	2. SMA Negeri 2 Jatiroto	Jatiroto	Kabupaten Lumajang	0887/0/1986	SMA Negeri 1 Jatiroto	Jatiroto	Kabupaten Lum
<u>XIX. KABUPATEN SITUBONDO</u>							
	1. SMA Negeri Situbondo	Situbondo	Kabupaten Situbondo	0371/0/1978	SMA Negeri 1 Situbondo	Situbondo	Kabupaten Si
	2. SMA Negeri Besuki	Suboh	Kabupaten Situbondo	0473/0/1983	SMA Negeri 1 Suboh	Suboh	Kabupaten Si
<u>XX. KABUPATEN BANYUWANGI</u>							
	1. SMA Negeri Banyuwangi	Glagah	Kabupaten Banyuwangi	0206/0/1980	SMA Negeri 1 Banyuwangi	Glagah	Kabupaten Ba
<u>XXI. KABUPATEN PAMEKASAN</u>							
	1. SMA Negeri Pamekasan	Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	0206/0/1980	SMA Negeri 1 Pamekasan	Pamekasan	Kabupaten Pa

dan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pembina Kematangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Dep
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



SALOTO, SH
NIF. 130317258